

**PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH DALAM
KONFLIK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN
BENER SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI DESA
WADAS**

Nama: Christina Maria Prahendadmoko
Ilmu Hukum

Contributor: Marianus Yohanes Gaharpung, S.H, M.S. dan Wafia Silvi Dhesinta
Rini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia. Penulis mengambil contoh sengketa PSN Bendungan Bener, yang terjadi karena ditetapkannya Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021, oleh Gubernur Jawa Tengah. Sengketa ini diajukan ke PTUN dengan Putusan Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG dan upaya kasasi dengan Nomor Putusan 482 K/TUN/2021. Dalam kedua putusan tersebut, gugatan ditolak, namun nyatanya berbagai prosedur dan substansi telah dilanggar Tergugat. Terdapat juga peraturan yang bertentangan (*conflict of norm*), namun tidak dicermati. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya wewenang Mahkamah Agung (MA) dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, bahwa putusan terkait tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi atau melalui permohonan langsung. Artinya seharusnya MA dapat menerima gugatan tersebut manakala Para Penggugat mengajukan permohonan untuk menyatakan agar peraturan yang bertentangan menjadi tidak sah, sehingga Tergugat dapat pula dikenakan pertanggungjawaban berupa pembatalan KTUN, pemulihan fungsi lingkungan hidup, hingga sanksi pidana karena pemberian izin lingkungan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pemerintah, Pengadaan Tanah, PSN.

PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH DALAM
KONFLIK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN
BENER SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI DESA
WADAS

Nama: Christina Maria Prahendadmoko
Ilmu Hukum

Pembimbing: Marianus Yohanes Gaharpung, S.H, M.S. dan Wafia Silvi Dhesinta
Rini, S.H., M.H.

ABSTRACT

Land acquisition disputes for the public interest often occur in Indonesia, especially in the implementation of National Strategic Projects (NSP) in Indonesia. The author takes the example of the Bener Dam PSN dispute, which occurred due to the issuance of Decree Number 590/20 of 2021 concerning Renewal of the Determination of Land Acquisition Location for the Construction of the Bener Dam in Purworejo Regency and Wonosobo Regency, Central Java Province dated June 7, 2021, by the Governor of Central Java. This dispute was submitted to the State Administrative Court with Decision Number 68/G/PU/2021/PTUN.SMG and cassation appeal with Decision Number 482 K/TUN/2021. In both decisions, the lawsuit was rejected, but in fact various procedures and substance had been violated by the Defendant. There are also conflicting regulations (conflict of norm), but they are not scrutinized. The research method used in this writing is normative juridical. The results of this study indicate the authority of the Supreme Court (MA) in Article 31 paragraph (3) of Law Number 5 Year 2004, that decisions related to the invalidity of laws and regulations can be determined in cassation level examinations or through direct requests. This means that the Supreme Court should be able to accept the lawsuit when the Plaintiffs submit a request to declare the conflicting regulations invalid, so that the Defendant can also be subject to liability in the form of canceling the KTUN, restoring environmental functions, and criminal sanctions for granting environmental permits without an Environmental Impact Assessment (AMDAL).

Keywords: Government Accountability, Land Acquisition, PSN.